

**WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)**

Oleh :

**LINA ANGGRAINI,S.Pd  
A.202131059**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Y.C. Thambun Anyang, SH.**

**Pembimbing II : Hj. Helina,SH.,MH**

**ABSTRACT**

This thesis addresses the issue mandatory job training as an alternative punishment in the juvenile justice system (a case study on child Correctional Lambaga class II B pontianak). The method used in this study is a research method by using sociological juridical approach ,. The results showed that: That the mandatory implementation of vocational training as a substitute for criminal fines for children at Children's Penitentiary Class II B Pontianak to do with the rights of children to education has not been effective because of weak oversight or program that is not right. That the purpose of compulsory job training in lieu of a criminal penalty so that children have the skills mantab to say a professional in their field has not been achieved for a given program is holistic, ketidakterdediaannya funds so it must surrender the child to be fostered private parties, and the absence of intensive supervision by the Department of Social West Kalimantan resulted in all child activities are strictly controlled by private parties. That the imposition of imprisonment and fines with the employment of the subsidiary shall exercise brat child should be consideration of the judge to specify where or which agency authorized to implement the mandatory vocational training. So that the Public Prosecutor had no trouble in carrying out the court's ruling. It is necessary for an understanding in applying Act No. 11 of 2011 in lieu of No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges of children, can ensure legal certainty to a sense of justice for the child. Recommendation: The government provides the implementing legislation of a technical nature regarding the implementation of compulsory secondary vocational training along with the facilities and infrastructure required lengkap. Program job training in lieu of a criminal penalty diperoleh advanced study skills for coaching children in prisons are tailored to the interests and talents anak. Mengadakan evaluation and facilitate children who carry out compulsory job training in lieu of criminal fine for kids to get a job.

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah wajib latihan kerja sebagai hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana anak (studi kasus pada lambaga permasyarakatan anak kelas II B pontianak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa: Bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pontianak hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan belum efektif karena lemahnya pengawasan atau program yang belum tepat. Bahwa tujuan pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda agar anak mempunyai keterampilan mantab untuk dikatakan seorang profesional dibidangnya belum dicapai karena program yang diberikan masih bersifat holistik, ketidakterseediaannya dana sehingga harus menyerahkan anak untuk dibina pihak swasta, dan tidak adanya pengawasan intensif oleh pihak Dinas Sosial Kalimantan Barat mengakibatkan semua aktivitas anak dikontrol secara ketat oleh pihak swasta. Bahwa Penjatuh pidana penjara dan denda dengan subsidi wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sebagai pengganti Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Rekomendasi : Pemerintah menyediakan peraturan perundang-undangan pelaksana yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan subsidi wajib latihan kerja beserta sarana dan prasarana yang lengkap. Program wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda merupakan studi lanjutan keterampilan yang diperoleh anak selama pembinaan di Lapas yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Mengadakan evaluasi dan memfasilitasi anak yang melaksanakan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak untuk memperoleh pekerjaan.

**Kata Kunci: wajib latihan kerja, hukuman, Sistem Peradilan Pidana Anak.**

## **Latar Belakang**

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat cenderung untuk mengalami suatu perubahan dalam kehidupan yang sederhana menuju suatu kehidupan yang lebih modern atau lebih baik dari kehidupan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dan terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi baru yang terjadi dan terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat terutama sekali sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perkotaan, di mana sering terjadi suasana yang tidak harmonis dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Orang tua dalam suasana yang tidak harmonis tidak lagi mempunyai wibawa dan panutan bagi anak-anaknya. Hal demikian mengakibatkan pola pikir dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kelompok bermainnya.

Selain itu dalam kehidupan masyarakat juga dijumpai banyak anak-anak yang tidak mendapat kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial dari orang tuanya. Karena keadaan/kondisi seperti ini, baik disengaja maupun tidak sengaja sering terdapat tindakan atau perilaku anak-anak yang dapat merugikan dirinya maupun masyarakat. Perilaku yang menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan berbagai faktor, antara lain akibat dampak negatif dari perkembangan dan perubahan yang cepat, arus

globalisasi informal dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan-perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan di lingkungannya akan membawa dampak yang kurang sehat serta merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam praktek tidak jarang dijumpai proses penyelesaian perkara oleh pihak yang berwenang kurang memperhatikan perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana terkadang diperlakukan seperti penjahat pada umumnya. Sikap petugasnya terkadang juga terlalu berlebihan dan terkesan menganggap ringan kejahatan yang dilakukan mereka, sehingga hal yang demikian bisa berakibat sebaliknya, yakni mereka bisa menjadi penjahat sesungguhnya.

Dalam kaitannya dengan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak nakal adalah anak yang melakukan

tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Setidaknya memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian Wajib Latihan Kerja dalam Undang-undang Nomor 11 tahu 2012 bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan

pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak diperoleh dari tahun 2011 sampai 2014 pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pontianak dari 19 (Sembilan belas) orang yang melaksanakan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda yang tidak dibayar atau yang dituliskan pidana subsider latihan kerja, hanya 4 (dua) orang yang dalam putusan hakim ditentukan pelaksanaannya pada dinas sosial, lainnya tidak disebutkan dimana tempat pelaksanaannya. Menambahkan bahwa semua anak yang melaksanakan subsider wajib latihan kerja telah memperoleh SK Pembebasan Bersyarat dan berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah.

Pelaksanaan pidana wajib latihan kerja sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan merupakan suatu hukuman yang harus dijalani anak yang mempunyai tujuan edukasi. Tercapainya tujuan edukasi diukur atas terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang didasarkan atas program (silabus dalam pendidikan formal). Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam pelaksanaan pidana subsider oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak tidak didasarkan atas program apakah berdasarkan bakat/minat, perencanaan, proses dan evaluasi. Namun penulis menilai bahwa hukuman yang ditekankan hanya

pada kewajiban pidana anak untuk melaksanakan latihan kerja. Pemerintah menginginkan agar anak yang bermasalah dengan hukum menjadi lebih baik seharusnya menyediakan sarana dan prasarana lengkap bukan hanya sekedar menitipkan di tempat praktek meraka latihan kerja tanpa memperhatikan efektivitas. Setelah pelaksanaan harus ada evaluasi yang membuktikan keberhasilan suatu program yang terencana itu. Namun, ini berbeda dengan pelaksanaan pidana subsider latihan kerja dimana tidak ada evaluasi apakah anak menerima dengan baik atau tidak tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk menulis proposal tesis dengan judul : **“WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai hukuman alternatif anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak pada saat ini?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan wajib latihan kerja yang ideal sebagai hukuman alternatif dalam sistem peradilan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak untuk masa yang akan datang ?

## **Pembahasan**



## **1. Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja Sebagai Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak.**

Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak asasi anak, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self-respect* pada diri anak dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat. Tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana sesuai juga dengan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Jadi pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi perkembangan anak termasuk dalam anak yang dituntut karena pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak nakal haruslah tetap memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Instrumen-instrumen Internasional seperti *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, dan Peraturan PBB (*United Nation Conventions*) memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 18 tahun ketika menghadapi proses peradilan sampai pemberian putusan.

Anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi menjadi penjahat dewasa di masa depan, jika tidak ditangani secara tepat. Penjatuhan pidana pada pelaku yang belum berumur 18 tahun diharapkan mencapai tiga tujuan yaitu :

- a. Bahwa pidana dan penanganan orang yang belum berumur 18 tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu,
- b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 tahun,
- c. Bahwa dengan pidana dan tindakan, akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang.

Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan agar anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Di samping perlu diperhatikannya hak-hak anak dalam kontak awal anak dengan penegak hukum (polisi) dan penggunaan sarana yang berupa diversion. Hak-hak anak itu antara lain:

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*).
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*).
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*).
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*).
5. Hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*).
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*)

Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 sebagai mana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsidi wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Untuk mengetahui data dari hasil penelitian lapangan tersebut akan digambarkan dalam bentuk tabel-tabel dibawah ini sesuai dengan jumlah angket yang disebarakan kepada responden.

Tabel 1  
Jenis Perkara Anak di Pengadilan Negeri Pontianak  
(2009-2014)

No.	Bulan	Jenis Kejahatan	Putusan Pengadilan
1	Januari 2009	Perkelahian	Pidana penjara 2 bulan 20 hari
2		Pencurian	Sanksi tindakan, berupa pidana pengawasan selama 4 bulan di Panti Sosial Anak
3		Narkoba	Pidana penjara selama 6 bulan
4		Perkelahian	Pidana penjara selama 21 hari
5		Narkoba	Sanksi tindakan, berupa pidana pengawasan selama 7 bulan di Panti Sosial Anak
6		Perkelahian	Pidana penjara 1 bulan 25 hari
7		Pencurian	Pidana penjara selama 3 bulan
8	2010	Pencurian	Pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari
9		Pencurian	Sanksi tindakan, dikembalikan kepada orang tua
10		Ganja	Pidana penjara selama 4 bulan
11		Pelecehan seksual	Pidana Penjara selama 9 bulan
12		perkelahian	Pidana Penjara selama 2 bulan
13	2011	Pencurian	Pidana penjara selama 3 bulan
14	2012	Narkoba	Pidana penjara selama 3 bulan
15		Pelecehan seksual	Pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari
16		Pencurian	Pidana penjara selama 2 bulan

17		Perkelahian	Sanksi tindakan, berupa pidana pengawasan selama 7 bulan di Panti Sosial Anak
18		Narkoba	Pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari
19		Pencurian	Pidana penjara selama 3 bulan
20		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan
21		Narkoba	Pidana penjara selama 3 bulan
22		Narkoba	Pidana penjara selama 2 bulan
23		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan
24		Perkelahian	Sanksi tindakan, dikembalikan kepada orang tua
25		Pelecehan Seksual	Pidana penjara selama 11 bulan
26		Perkelahian	Sanksi tindakan, berupa pidana pengawasan selama 6 bulan di Panti Sosial Anak
27	2013	Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan
28		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan
29		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan
30		Narkoba	Pidana penjara selama 6 bulan
31		Perkelahian	Pidana penjara selama 3 bulan
32		Perkelahian	Pidana penjara selama 3 bulan
33		Perkelahian	Pidana penjara selama 3 bulan
34	2014	Narkoba	Pidana penjara selama 7 bulan
35		Pelecehan Seksual	Pidana penjara selama 9 bulan 16 hari
36		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan 15 hari
37		Perkelahian	Pidana penjara selama 3 bulan
38		Narkoba	Pidana penjara selama 5 bulan
39		Narkoba	Pidana penjara selama 5 bulan 10 hari
40		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan

41		Perkelahian	Pidana penjara selama 2 bulan 17 hari
----	--	-------------	---------------------------------------

Sumber Pengadilan Negeri Pontianak

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Hakim lebih banyak memutus sanksi kurungan/penjara yang dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga bukan tidak mungkin mental anak yang berhadapan dengan hukum dapat terguncang (apalagi ketika ia baru pertamakali melakukan tindak pidana ataupun perbuatan yang terlarang bagi anak nakal tersebut). Untuk itu hakim memberikan pidana pengganti berupa latihan kerja seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2  
Besarnya Denda & Subsider Latihan Kerja  
n = 19 orang

No.	Denda (Rp)	Latihan Kerja	
		Lama	Jumlah
1	60 jt	30 hari	02
		60 hari	03
		90 hari	0
2	150 jt	30 hari	01
		60 hari	0
		90 hari	0
3	500 jt	30 hari	0
		60 hari	04
		90 hari	03
4	800jt	30 hari	0
		60 hari	02
		90 hari	0
5	1 M	30 hari	03
		60 hari	01
		90 hari	0
JUMLAH			19

Sumber Data: LPKA Klas II B Pontianak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang melaksanakan latihan kerja selama 30 hari adalah 7 (tujuh) orang, 60 hari adalah 10 (sepuluh) orang, dan 90 hari adalah 3 (tiga) orang. Seperti yang digambarkan dalam tabel lamanya latihan kerja tidak harus disesuaikan dengan besarnya denda yang diberikan karena setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai substansial yang berbeda maka agar putusan itu adalah yang terbaik dan *problem solving* bagi anak hakim memberikan pidana pengganti latihan kerja. Tujuan utama pemidanaan yang hendak dicapai bagi anak pidana sebagai seorang mempunyai kebutuhan khusus adalah untuk membangkitkan kepercayaan diri anak bahwa sesungguhnya ia mampu bekerja dan diakui masyarakat melalui latihan kerja yang ditujukan untuk menjadikan seorang profesional.

TABEL 3

Anak Yang Diberikan Pidana Penjara & Denda Beserta Subsidiernya

No.	Tahun	JUMLAH	Putusan Hakim		Melaksanakan Latihan Kerja
			Kurungan	Latihan Kerja	
1	2009	07	07	0	0
2	2010	07	05	02	0
3	2011	06	01	05	02
4	2012	17	13	04	02
5	2013	08	07	01	07
6	2014	10	08	05	08
JUMLAH		55	41	17	19

Sumber Data : LPKA Klas II B Pontianak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda umumnya diberikan subsider kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan.

TABEL 3

Latar Belakang Usia Anak Yang Melaksanakan Latihan Kerja

No.	Usia	Jumlah
1	≤ 13 Tahun	0
2	≤ 14 Tahun	0
3	≤ 15 Tahun	0
4	≤ 16 Tahun	04
5	≤ 17 Tahun	05
6	≤ 18 Tahun	10
JUMLAH		19

Sumber Data : LPKA Anak Klas II B Pontianak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak yang melaksanakan latihankerja usia ≤ 16 tahun sejumlah 04 (empat) orang, ≤ 17 tahun sejumlah 5 (lima) orang, dan ≤ 18 tahun sejumlah 10 (sepuluh) orang.

TABEL 4

Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Oleh Anak

No.	Nama	Melaksanakan Latihan Kerja	Jenis Latihan Kerja
1	Wahyudi	15 – 12 – 2011 Sd 12 – 02- 2012	Benkel
2	Sadam	26 – 10 – 2011 Sd 22 – 01 – 2012	Bengkel
3	Joni	18 – 04 – 2012 Sd 17 – 05- 2012	Mebel
4	Heri	22 – 06 – 2012 Sd 20 – 08 – 2012	Mebel
5	Rendi	20 – 04 – 2013 Sd 18 – 06 – 2013	Bengkel
6	Julianto	25 – 07 – 2013 Sd 22 – 09 – 2013	Bengkel



7	Rani	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
8	Dewi	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Salon
9	Badri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 11 – 2013	Bengkel
10	Arifin	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 12- 2013	Benkel
11	Sandri	16 – 10 – 2013 Sd 14 – 12 – 2013	Bengkel
12	Andre	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel
13	yuda	20 – 04 - 2014 Sd 18 – 06 – 2014	Mebel

Sumber Data : Dinas Sosial Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan subsider latihankerja tanpa teman oleh 6 orang anak, 2 orang anak selama 39 hari (15 – 12 – 2011 sd 22 – 01 – 2012), 5 orang anak selama 30 hari (16 – 10 – 2013 sd 14 – 11 – 2013), dan 2 orang anak selama 30 hari (15 – 11 – 2013 sd 14 – 12- 2013). Ini dikarenakan lamanya pidana penjara dan subsider latihan kerja setiap anak berbeda sehingga mempengaruhi pelaksanaan subsider latihan kerja juga berbeda. Keterampilan yang diberikan berupa mengelas teralis pada Bengkel Las Intan Jl. Suwignyo Pontianak.

Kesesuaian minat dan bakat anak dengan bidang latihan kerja

n = 11 Orang

TABEL 5

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Persentase
1	Cukup Memadai	8	73%
2	Kurang Memadai	3	27%
Jumlah		11	100 %

Sumber Data : Hasil penelitian data yang diolah di Bengkel Las Intan Jl. Suwignyo Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 8 orang (73%) responden menilai fasilitas tempat latihan kerja mengelas teralis cukup memadai dengan ketersediaan alat dan bahan yang diperlukan dan

lingkungan sekitar yang hening jauh dari keramaian membuat nyaman. Namun, 3 orang responden (27%) menilai fasilitas tempat latihan kerja mengelas teralis masih kurang memadai, ruangan latihan kerja sempit, tidak terawat, dan disamakan dengan tempat kerja buruh, serta tidak adanya *tutor* (pengajar) yang siap melayani responden.

TABEL 6

Pendapat Anak Mengenai Sikap Pekerja Bengkel Las Intan Dalam Melaksanakan  
Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda

n = 11 Orang

No.	Sikap	Jumlah	Persentase
1	Cukup Mendukung	8	73%
2	Kurang Mendukung	3	27%
Jumlah		11	100%

Sumber Data : Hasil penelitian data yang diolah di Bengkel Las Intan Jl. Suwignyo Pontianak

Berdasarkan hasil penelitian data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 orang (73%) responden menilai sikap pekerja Bengkel Las Intan cukup mendukung dengan memberikan kepercayaan responden untuk mengelas teralis, 6 orang (27%) responden menilai sikap pekerja Bengkel Las Intan kurang mendukung dengan alasan kurang aktif membantu responden dalam mengelas teralis, responden diajarkan cara sebelum mengelas dan selebihnya melihat pekerja/buruh dalam mengerjakan tugasnya.

TABEL 7

Kepercayaan Penggunaan Alat Dalam Melaksanakan Wajib Latihan Kerja Sebagai Pengganti  
Pidana Denda n = 11 Orang

No.	Kepercayaan Dalam Penggunaan Alat	Jumlah	Persentase
1	Cukup Dipercaya	7	64%
2	Kurang Dipercaya	4	36%

Jumlah	11	100 %
--------	----	-------

Berdasarkan hasil data penelitian tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa bahwa 7 orang (64%) responden menilai cukup ada kepercayaan dalam penggunaan alat dan 4 orang (36%) responden menilai kurang ada kepercayaan dalam penggunaan alat.

TABEL 8

Tindak Lanjut Oleh Tempat Yang Melaksanakan Latihan Kerja

n = 11 Orang

No.	PEREKRUTAN	JUMLAH	Persentase
1	Ada	01	9%
2	Tidak ada	10	91%
Jumlah		11	100 %

Sumber Data : Dinas Sosial Kalimantan Barat

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anak yang melaksanakan latihan kerja haya ada 1 (9%) orang yang direkrut secara langsung oleh tempat yang memberikan latihan kerja bagi anak. Ini menggambarkan cukup ada kepercayaan diri dari pihak luar (swasta) yang bersangkutan mengenai keterampilan yang dipunyai anak.

Setelah menganalisis data angket penelitian anak yang melaksanakan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, maka selanjutnya akan dikemukakan pula hasil wawancara dengan Kasi bimbingan narapidana dan kegiatan kerja (binapigiatja) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak sebagai berikut:

1. Bahwa sarana dan prasana dalam pelaksanaan hak anak didik masyarakatan atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 14 ayat 1 huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan) berupa latihan kerja masih tidak memadai sehingga LPKA Anak Klas II B Pontianak belum siap sebagai tempat anak menjalani wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda atau disebut pidana subsider latihan kerja.
2. Selama ini anak yang melaksanakan pidana subsider latihan kerja berkelakuan baik dan memenuhi syarat lainnya yang ditentukan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007, Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum & HAM No. No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No. M.HH-02.PK.05.06 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum & HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Sehingga timbul ide anak melaksanakan pidana subsider latihan kerja diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak.
3. Dalam proses serah terima dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak kepada Dinas Sosial Kalimantan Barat, tidak ada pembahasan mengenai bakat, perkembangan jiwa dan bagaimana anak harus melaksanakan pidana subsider latihan kerja.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Dinas Sosial Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Tidak adanya dana untuk melaksanakan pidana subsider latihan kerja secara mandiri, anak dititipkan di “Bengkel Las Intan” bagi yang berjenis kelamin laki-

laki dan “Erna Swiss Salon” bagi perempuan, keduanya terletak di Jl. Suwignyo kota Pontianak. Karena semua berjenis kelamin laki-laki maka pelaksanaan pidana subsider latihan kerja di Bengkel Las Intan sebagai badan usaha pengelasan teralis.

2. Tidak ada kualifikasi untuk menentukan tempat pelaksanaan latihan kerja, hanya didasarkan pada hubungan baik.
3. Tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan keberalihan tanggungjawab atas anak yang melaksanakan pidana subsider latihan kerja.
4. Dalam menitipkan anak melaksanakan pidana subsider latihan kerja, Dinas Sosial Kalimantan Barat memberitahukan lama latihan kerja oleh anak dan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lama latihan kerja hanya 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
5. Tidak ada pengawasan intensif dari Dinas Sosial Kalimantan Barat dalam pelaksanaan latihan kerja ataupun bentuk absensi lainnya.
6. Tidak ada evaluasi atas pelaksanaan pidana subsider latihan kerja.
7. Dinas Sosial melaporkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak bahwa anak telah melaksanakan pidana subsider latihan kerja dalam bentuk berita acara serah terima.

Pelaksanaan pidana wajib latihan kerja sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan merupakan suatu hukuman yang harus dijalani anak yang mempunyai tujuan edukasi. Tercapainya tujuan edukasi diukur atas terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang didasarkan atas program (silabus dalam pendidikan formal). Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam pelaksanaan pidana subsider oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B

Pontianak tidak didasarkan atas program apakah berdasarkan bakat/minat, perencanaan, proses dan evaluasi. Namun ditekankan pada kewajiban pidana anak untuk melaksanakan latihan kerja.

Selama anak melaksanakan pidana pokok di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak ia telah memperoleh pembinaan keterampilan seperti pertanian, salon, bengkel, pengelasan, dan sebagainya. Dalam melaksanakan pembinaan keterampilan bagi anak, pihak Lapas juga bekerjasama dengan pihak luar baik negeri maupun swasta. Program pembinaan yang diberikan masih bersifat holistik berlaku bagi semua anak didik masyarakat. Dari berbagai pembinaan keterampilan dan konseling khususnya dalam tahap mapenaling (pengenalan lingkungan) sejak anak dipidana hingga melaksanakan 1/3 masa pidananya seharusnya wali masyarakat sudah mengetahui bakat/minat anak didik masyarakat. Selanjutnya minat/bakat anak seharusnya dikembangkan dalam pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Namun pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak diberikan bersifat holistik berupa keterampilan mengelas teralis, ini berbedadengan yang diharapkan agar keterampilan yang dimiliki anak mantab sesuai dengan minat/bakatnya.

Agar pelaksanaan latihan kerja dapat mencapai tujuan memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi anak harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana digambarkan dalam tabel 5, 6, dan 7. Dalam tabel 5 menggambarkan kondisi fasilitas yang ada di Bengkel Las Intan. Bengkel industri rumah tangga dengan ruangan yang sempit dan terbatasnya waktu pekerja/buruh untuk melatih anak, masih mempunyai rasa nyaman bagi anak sehingga dapat dinilai kurang memadai.

Dalam tabel 6 menggambarkan ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang mempengaruhi sikap pekerja/buruh Bengkel Las Intan yang berfungsi sebagai pendidik dinilai kurang mendukung. Tuntutan untuk menyelesaikan pesanan pembeli menjadikan pekerja/buruh mengabaikan untuk memberikan keterampilan yang terbaik bagi anak.

Tabel 7 ketidaktersediaan sarana dan prasarana mempengaruhi kepercayaan dalam penggunaan alat dan bahan dinilai kurang percaya, dimana diukur atas penilaian subjektif berupa latar belakang anak bermasalah dengan hukum. Fakta ini menunjukkan *stigma* yang melekat pada anak mengakibatkan pihak luar (swasta) tidak mampu memberikan pendidikan latihan kerja.

Disamping itu yang menjadi tujuan utama ilmu yang diberikan dapat diserap maksimal oleh anak sehingga ia mampu bekerja digambarkan pada table Tabel 8 menggambarkan tingkat ketercapaian yang dapat diukur hanya 1 orang (9%) saja. Hal ini menunjukkan salah satu indikator yang menentukan tercapainya tujuan pembelajaran latihan kerja bagi anak untuk mengembalikan kepercayaan diri anak bahwa ia mampu bekerja dan diakui masyarakat. Namun sisi lain ini menggambarkan kegagalan pelaksanaan latihan kerja yang tidak cukup mampu menjadikan anak mempunyai keterampilan yang mantab sehingga dapat dikatakan pekerja profesional.

Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) menjadikan pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda hanya semata-mata saja. Dinas Sosial Kalimantan Barat yang seharusnya berfungsi sebagai pelaksana yang memberikan latihan kerja hanya sebagai fasilitator dengan menempatkan anak di bengkel milik pihak swasta tanpa adanya

standarisasi yang jelas pemilihan tempat tersebut. Bengkel sebagai badan usaha yang berorientasi pada *profit* diberikan kewenangan sepenuhnya memberikan pelatihan kerja bagi anak. Pekerja pada bengkel adalah seorang profesional yang produktif sehingga tidak lah dapat untuk diposisikan sebagai pendidik (*tutor*). Ketidakjelasan pelaksanaan latihan kerja juga dapat digambarkan dari tidak adanya pengawasan oleh pihak Dinas Sosial yang digambarkan dari tidak adanya absensi dan semauanya saja pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak.

## **2. Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja Sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas Kelas II B Pontianak Untuk Masa Yang Akan Datang.**

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

Selanjutnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Anak dan Anak Didik Pemasarakatan. Selain Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak dikenal juga Balai Pemasarakatan (BAPAS) yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pamasarakatan. Pada prinsipnya, tidak ada penjara bagi anak bahkan Konvensi Hak Anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum di dalam lembaga pamasarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum,



maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai - nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pembinaan mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, maka mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan bangsa dengan berbekal mental dan keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat.

Disadari bahwa untuk melaksanakan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dalam hal sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan

pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Telah banyak para ahli yang membahas dan memberikan pengertian mengenai masa anak-anak, antara lain ditinjau dari segi umur ataupun ciri-ciri lainnya.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 telah ditetapkan bahwa anak-anak yaitu yang berusia 14 tahun kebawah. Sedangkan menurut UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang ketentuan pokok kesejahteraan anak. Anak adalah seorang yang mencapai usia 21 tahun kebawah dan belum kawin. Kategori usia seorang anak di Indonesia sangatlah bervariasi. Hukum kita masih memberikan definisi yang berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang anak itu diberikan batasan usia 18 tahun kebawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah kawin atau belum kawin.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hak asasi tersebut disebutkan tentang berbagai hal antara lain :  
Hak Anak yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martab kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, diasuh, oleh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan atau jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan social.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pembangunan diri.

Menurut Pasal 1 butir (3) UU No. 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta resosialisasi.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam UU ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat penampungan orang – orang jahat yang mana mereka telah dicap sebagai

sampah masyarakat yang hanya bisa mengganggu ketenangan masyarakat dan hanya bisa bersifat parasit dalam lingkungan masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah bangunan yang berupa dengan siksaan dan sebagai penampungan orang – orang jahat seperti : penodong, pencuri, pembunuh dan sebagainya yang mengganggu ketenangan masyarakat saja dan ditangkap oleh pihak yang berwenang agar ketenangan masyarakat dapat terjamin karenanya.

Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, putusan hakim seperti halnya perkara-perkara diatas yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Dikarenakan di dalam diktum Putusan Hakim yang tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan tersebut menyebabkan adanya keraguan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan putusan hakim tersebut apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut telah selesai menjalani masa pidana penjaranya.

Undang-undang No 3 Tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak sudah berlaku selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Undang Undang ini mengatur secara khusus mekanisme pemidanaan dan pemberian tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih berusia kurang dari 18 tahun. Dengan demikian substansi Undang Undang ini lebih lengkap dibandingkan dengan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP Keberadaan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak ini memberikan harapan akan tersedianya peraturan hukum yang mengkhususkan pengaturan terhadap anak nakal.

Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Dalam Undang Undang Tentang Pengadilan Anak terdapat pengaturan tentang batas usia anak yang menjadi kompetensi absolutnya, sanksi pidana yang dapat diancamkan, hukum acara, dan tindakan (*maatregel*) bagi anak nakal pelaku tindak pidana (anak nakal dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak). Mekanisme perlindungan dan pembinaan dalam Undang Undang Pengadilan Anak mencerminkan perlindungan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Perkara anak yang menjadi kompetensi pengadilan anak semakin lama semakin meningkat jumlahnya, hal ini disebabkan selain karena faktor ekonomi dari anak tersebut juga karena tujuan pemidanaan secara umum (*general deterence*) yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana berjalan kurang efektif.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Pengadilan Anak berbeda dengan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 67 yang isinya adalah sebagai berikut : “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Adanya perlindungan pada anak yang dijatuhi pidana dalam undang undang ini tercermin dalam ketentuan di bawah ini Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut : “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Maksimum pidana penjara yang diancamkan juga tidak boleh lebih dari 1/2 (setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Selain itu, pidana mati juga tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak yang isi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a) pidana penjara;
- b) pidana kurungan;
- c) pidana denda; atau
- d) pidana pengawasan.

Selain itu perlindungan yang diberikan tidak hanya dalam hukum materiil saja tetapi juga dalam hukum formil. Sekalipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 diatur secara khusus hukum acara untuk pengadilan anak, namun masih memakai KUHP sebagai hukum generalisnya.

Selanjutnya penegasan tentang batas umur minimum dan maksimum dalam undang undang ini sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak nakal. Meningkatnya jumlah perkara anak dan recidivis anak menunjukkan pembedaan yang diatur dalam Undang Undang Pengadilan Anak masih menunjukkan kelemahan. Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal (seperti wajib latihan kerja), sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pembedaan dalam hukum pidana anak.

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pembedaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium atau the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Asas *ultimum remedium atau the last resort* untuk pembedaan anak juga memiliki landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice)* menegaskan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules*.



Dari hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak diperoleh fakta bahwa dari beberapa dokumen putusan Pengadilan Negeri Pontianak antara tahun 2004 sampai dengan 2011 terdapat 11 perkara dengan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 80 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf C, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Hakim berdalih bahwa tidak mencantumkan lembaga tempat latihan kerja karena sampai saat ini belum ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk tempat latihan kerja bagi terpidana anak. Ini membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap terpidana anak khususnya yang dikenai putusan pidana denda dengan subsidair wajib latihan kerja, dimana akan dilaksanakan wajib latihan kerja dimaksud. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tempat dimana anak tersebut melaksanakan wajib latihan

kerja tersebut sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana anak.

Selain itu pada putusan hakim terhadap perkara yang dilakukan oleh anak di dalam diktumnya menjatuhkan putusan dengan akumulasi tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, padahal di dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan" sedangkan pidana Penjara dan dan denda sama-sama termasuk dalam Jenis Pidana Pokok.

Hakim berdalih bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak di dasarkan pada ketentuan dari pasal yang telah di dakwakan terhadap terdakwa, bukan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal seperti diketahui bahwa ada Asas yang mengatur bahwa apabila ada aturan yang lebih khusus, maka aturan umum harus dikesampingkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian diolah dan dianalisa guna pembuktian hipotesa yang diajukan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan belum efektif karena lemahnya pengawasan atau program yang belum tepat.

2. Bahwa tujuan pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda agar anak mempunyai keterampilan mantab untuk dikatakan seorang profesional dibidangnya belum dicapai karena program yang diberikan masih bersifat holistik, ketidaktersediaannya dana sehingga harus menyerahkan anak untuk dibina pihak swasta, dan tidak adanya pengawasan intensif oleh pihak Dinas Sosial Kalimantan Barat mengakibatkan semua aktivitas anak dikontrol secara ketat oleh pihak swasta.
3. Bahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sebagai pengganti Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang : BP Undip Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice Sistem)*, Putra Bardin, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 25 Juni 1994, Semarang.
- Chambliss, Wiliam J. dan Seidman, Robert B., *Law, Order and Power*, Reading Mass, Addison-Westley.
- D.S. Dewi Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pre Publishing.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Kusumah, Mulyana, W., 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, PT. Armico, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Margaret, M. Poloma, *Teori Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana W. Kusumah. 1986, *Hukum dan Hak Anak-anak*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Purwoto S. Gandasubrata, 1991, *Tugas Hakim Indonesia*, Termuat Dalam Buku Reader III Jilid I, Tim Pengkajian Mahkamah Agung, RI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, Bandung.
- , 1987, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1, BPHN, Jakarta.
- , Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, BAndung.
- Reksodiputro, Marjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifyal Ka'bah, 2002, *Integritas Moral Hakim Pengadilan*, Termuat Dalam Jurnal Pusdiklat MA RI, Volume 1 Nomor 4, Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang.
- Seidman, Robert B., 1972, *Law and Development: A General Model*, *Law and Socity Review*, Jilid VII.
- Soedjono, Dirdjosiswono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan : Intruduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*, STHB Press, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1983, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Cetakan Kedua, Jakarta.
- , dan mamoedji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.

- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Soleman, B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahali Indonesia, Jakarta.
- Susanto, I.S., 1991, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.

